

Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Zihan Afita Sari^{a*}, Tiur Roida Simbolon^a, Muhammad Farras Nasrida^a

^a Universitas Palangka Raya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 28-05-2026

Revised : 18-06-2026

Accepted : 23-06-2026

Keywords: Accountability, BPKAD, Financial Report Quality, SPIP

Kata Kunci: Akuntabilitas, BPKAD, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP

Corresponding Author:

Gajiterima8@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in supporting the quality of financial reports at the Regional Finance and Asset Agency (BPKAD) of Palangka Raya City. The study employed a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that SPIP implementation has been carried out through the elements of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The implementation of SPIP has contributed to improving the reliability, accuracy, and accountability of financial reports. However, challenges remain, including limited human resource competency and regulatory dynamics that require ongoing adjustments.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP telah dilaksanakan melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP berkontribusi dalam meningkatkan keandalan, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan dinamika regulasi yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap terciptanya pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta terbebas dari berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah secara tepat, lengkap, dan dapat dipercaya.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai media penyampaian informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui laporan tersebut, masyarakat, lembaga legislatif, auditor, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi mengenai posisi keuangan daerah, realisasi pelaksanaan anggaran, arus kas, maupun kinerja keuangan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Walaupun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawas menunjukkan adanya sejumlah kelemahan, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset tetap yang belum dilakukan secara optimal, ketidakpatuhan terhadap prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan, serta kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem akuntansi yang memadai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan dalam organisasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting yang berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, perlindungan dan pengamanan aset negara, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiyana, Susbiyani, dan Eko (2020) menemukan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Heinrich dan Probohudono (2024) yang menyimpulkan bahwa efektivitas SPIP memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada sektor publik.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggadini, Bramasto, dan Aulia (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dwiyana, Yudantara, dan Julianto (2019) yang menyatakan bahwa implementasi SPIP, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta keberadaan fungsi audit internal secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah.

Perkembangan lingkungan organisasi dan kemajuan teknologi informasi turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan SPIP dalam instansi pemerintah. Keberhasilan implementasi SPIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur pengendalian yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, serta tingkat kematangan sistem pengawasan internal. Penelitian Susandra, Kusuma (Susandra, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan implementasi SPIP merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025) menemukan bahwa tingkat maturitas SPIP serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kota Palangka Raya memegang peranan strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya sistem pengendalian intern yang berjalan secara efektif agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi SPIP pada BPKAD Kota Palangka Raya menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana sistem pengendalian intern mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan SPIP di lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menggali informasi

secara komprehensif mengenai proses implementasi SPIP, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berupaya mengungkap kondisi nyata implementasi SPIP secara langsung dalam konteks organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai kontribusi sistem pengendalian intern terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis system implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menganalisis penerapan unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, menganalisis Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam mengatasi kendala implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memerikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel, transparan, andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

METODE

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap terciptanya pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta terbebas dari berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah secara tepat, lengkap, dan dapat dipercaya.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai media penyampaian informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui laporan tersebut, masyarakat, lembaga legislatif, auditor, serta para pemangku

kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi mengenai posisi keuangan daerah, realisasi pelaksanaan anggaran, arus kas, maupun kinerja keuangan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Walaupun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawas menunjukkan adanya sejumlah kelemahan, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset tetap yang belum dilakukan secara optimal, ketidakpatuhan terhadap prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan, serta kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem akuntansi yang memadai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan dalam organisasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting yang berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, perlindungan dan pengamanan aset negara, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Lusiyana, 2020). Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Heinrich dan Probohudono (2024) yang menyimpulkan bahwa efektivitas SPIP memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada sektor publik.

Selain itu, sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dwiyana, Yudantara, dan Julianto (2019) yang menyatakan bahwa implementasi SPIP, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta keberadaan fungsi audit internal secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah.

Perkembangan lingkungan organisasi dan kemajuan teknologi informasi turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan SPIP dalam instansi pemerintah. Keberhasilan

implementasi SPIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur pengendalian yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, serta tingkat kematangan sistem pengawasan internal. menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan implementasi SPIP merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025) menemukan bahwa tingkat maturitas SPIP serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kota Palangka Raya memegang peranan strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya sistem pengendalian intern yang berjalan secara efektif agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi SPIP pada BPKAD Kota Palangka Raya menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana sistem pengendalian intern mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan SPIP di lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai proses implementasi SPIP, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berupaya mengungkap kondisi nyata implementasi SPIP secara langsung dalam konteks organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai kontribusi sistem pengendalian intern terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan beberapa staf pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, diketahui bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi bagian integral dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SPIP dilakukan dengan mengacu pada lima unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

B. Pembahasan

Implementasi SPIP dalam Mendukung Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya telah dilaksanakan melalui penerapan lima unsur utama pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa SPIP tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam menjamin keandalan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPIP sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam membangun budaya organisasi yang menekankan nilai akuntabilitas dan transparansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penerapan standar operasional prosedur yang konsisten, serta pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai tingkat maturitas SPIP yang menegaskan bahwa efektivitas pengendalian intern dipengaruhi oleh dukungan organisasi, pembinaan yang berkesinambungan, serta pengawasan internal yang memadai.

Lingkungan pengendalian merupakan unsur fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan sistem pengendalian intern. Pada BPKAD Kota Palangka Raya, lingkungan pengendalian yang kondusif tercermin dari kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang berlaku serta tingginya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih andal karena setiap transaksi keuangan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan temuan tersebut, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi.

Penilaian Risiko sebagai Upaya Pencegahan Kesalahan Pelaporan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Palangka Raya telah melaksanakan identifikasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, khususnya risiko keterlambatan penyampaian data, kesalahan dalam pencatatan transaksi, serta ketidaksesuaian data aset daerah. Meskipun proses identifikasi risiko telah berjalan dengan baik, aspek dokumentasi dan pemantauan risiko masih memerlukan penguatan agar pelaksanaannya lebih terstruktur dan sistematis.

Dalam perspektif teoritis, penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam SPIP yang berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko yang efektif memiliki hubungan positif dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah serta efektivitas sistem pengendalian intern. Dari sudut pandang kualitas laporan keuangan, identifikasi risiko memungkinkan organisasi untuk melakukan tindakan preventif sebelum muncul kesalahan yang dapat memengaruhi penyajian informasi keuangan. Oleh karena itu, semakin optimal proses penilaian risiko yang diterapkan, semakin besar pula kemampuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas Kegiatan Pengendalian

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada BPKAD Kota Palangka Raya diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pemisahan fungsi kerja, pemberian otorisasi terhadap transaksi, verifikasi dokumen pendukung, serta rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, setiap transaksi keuangan harus melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi sebelum dicatat ke dalam sistem, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak tahap awal proses pengelolaan keuangan.

Temuan tersebut mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui pengurangan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan administrasi, maupun tindakan kecurangan (fraud).

Selain itu, penerapan kegiatan pengendalian secara konsisten memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh transaksi keuangan telah dicatat berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Peran Teknologi Informasi dalam Implementasi SPIP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas implementasi SPIP di BPKAD Kota Palangka Raya. Melalui pemanfaatan SIPD, proses pengelolaan dan pengolahan data keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, serta terintegrasi antarunit kerja.

Penggunaan teknologi informasi tersebut mampu mengurangi potensi kesalahan yang berasal dari proses manual, mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi data, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antarbagian dalam organisasi. Hasil

penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menemukan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan SPIP secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam era transformasi digital sektor publik, teknologi informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana administratif, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem pengendalian intern yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, optimalisasi pemanfaatan SIPD perlu terus dilakukan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pada masa yang akan datang.

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan terhadap implementasi SPIP di BPKAD Kota Palangka Raya dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti evaluasi internal, reviu atas laporan keuangan, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan pemantauan secara berkala memberikan peluang bagi organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas pengawasan internal dan kematangan sistem pengendalian intern yang diterapkan. Semakin tinggi tingkat kematangan SPIP yang dimiliki organisasi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Di samping itu, pemantauan yang dilakukan secara efektif juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran organisasi. Setiap temuan audit dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan prosedur kerja serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada periode berikutnya.

Kendala Implementasi SPIP

Meskipun implementasi SPIP pada BPKAD Kota Palangka Raya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang paling dominan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengendalian intern, perubahan regulasi yang berlangsung cukup cepat, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Temuan tersebut konsisten dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern serta kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Ketersediaan aparatur yang kompeten menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap unsur SPIP dapat diimplementasikan secara optimal.

Selain faktor sumber daya manusia, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada ketepatan waktu penyampaian data dan tingkat akurasi informasi yang diberikan oleh masing-masing unit kerja. Keterlambatan maupun ketidaksesuaian data berpotensi menghambat proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SPIP memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Palangka Raya. Pelaksanaan SPIP yang efektif mampu meningkatkan keandalan informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen manajemen yang mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, implementasi SPIP yang didukung oleh kompetensi aparatur yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta komitmen pimpinan yang kuat akan mampu mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Lampiran

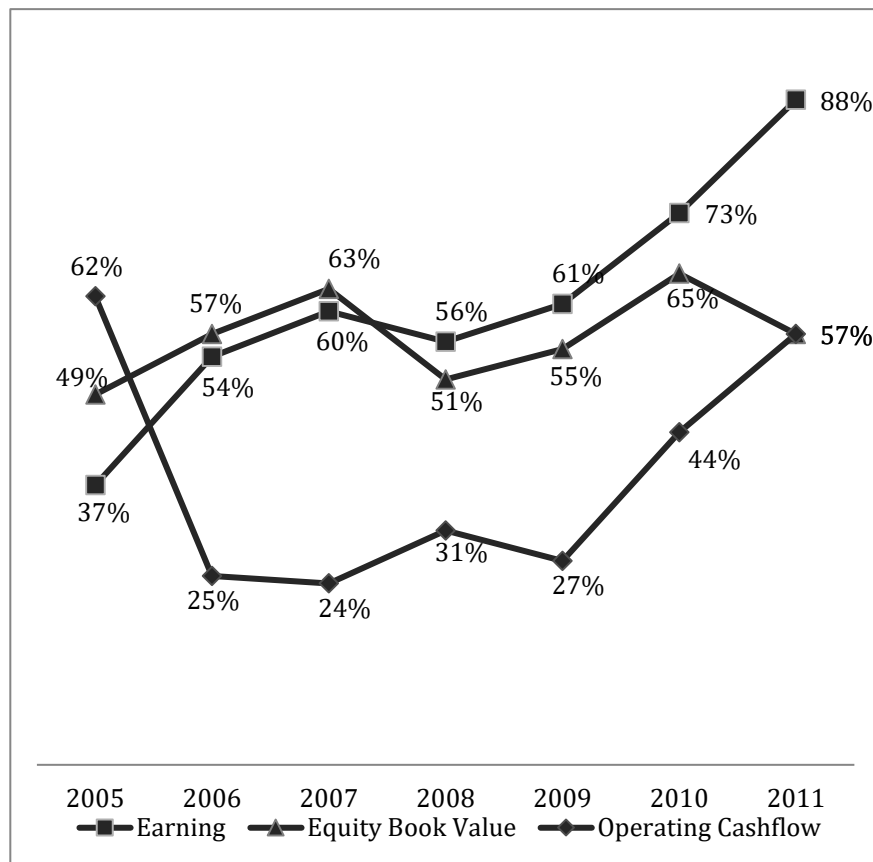
Tabel 1. Ringkasan *output* SPSS atas pengujian uji beda antara VAR dan TVA

	<i>P Value</i>						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Panel A: VAR</i>							
<i>T +/- 1</i>	0,511	1	0,880	1	0,775	1	0,892
<i>T +/- 2</i>	0,907	0,910	0,915	0,576	0,762	0,624	0,923
<i>T +/- 3</i>	0,849	0,579	0,542	0,235	0,869	0,378	0,814

	<i>P Value</i>						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Panel B: TVA</i>							
<i>T +/- 1</i>	0,503	0,307	1	0,710	0,499	0,749	0,280
<i>T +/- 2</i>	1	0,002*	0,281	0,245	0,086**	0,815	0,064**
<i>T +/- 3</i>	1	0,000*	0,082**	0,090**	0,072**	0,338	0,015*

*Significant on $\alpha = 0,05$

**Significant on $\alpha = 0,1$



Sumber: IDX (2012)

Gambar 1. Tren Indikator Keuangan

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Palangka Raya berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Pelaksanaan SPIP telah mengacu pada lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, dan komitmen pimpinan dalam menegakkan integritas serta kepatuhan terhadap peraturan. Pada aspek penilaian risiko, BPKAD telah melakukan identifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, meskipun dokumentasi dan pemantauan risiko masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan melalui pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, verifikasi dokumen, dan rekonsiliasi data sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mendukung efektivitas proses informasi dan komunikasi dengan meningkatkan kecepatan, akurasi, serta integrasi data keuangan. Pemantauan pengendalian juga telah dilakukan melalui evaluasi internal, reviu laporan keuangan, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun BPK.

Implementasi SPIP terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan memastikan informasi yang disajikan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, perubahan regulasi yang dinamis, kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antarperangkat daerah yang perlu diperkuat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko, optimalisasi teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi SPIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur pengendalian yang memadai, tetapi juga oleh komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, dan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, penguatan SPIP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh sistem berbasis akrual, teknologi informasi, dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5 (10), 3475–3500.
- Andina, N., Nurlaila, N., & Nurwani, N. (2023). Sistem pengendalian intern pemerintah

- (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(1), 627–641. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.6484>
- Danari, C. P., & Nugraha, A. A. (2024). Pengaruh SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada OPD Pemerintah Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.35313/iarj.v4i3.5175>
- Febri, D., Rahayu, S., & Wiralestari. (2019). *Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja. DOI: 10.22437/jaku.v4i3.8136.
- Hardiansyah, D., & Hasanudin. (2024). *Pengaruh SAP, Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui SPIP*. COSTING. DOI: 10.31539/costing.v7i5.12236.
- Lusiyana, D., Susbiyani, A., & Eko, D. (2020). *Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Naida, N. (2024). *Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM*. Solusi. DOI: 10.26623/slsi.v22i4.10554.
- Natanael, Y. A., & Jamaris, E. (2023). Pengaruh penerapan SAP, kualitas SDM, penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.59086/jak.v2i2.145>
- Putri, J. D., Sapitri, A., Pamastutiningtyas, T. S., & Pujiatmoko, E. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Systematic literature review. *YUME: Journal of Management*.
- Sinaga, N., & Natalia, E. Y. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 95–106. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.457>
- Susandra, F., Kusuma, I. C., & Qolbi, H. T. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan, lama pengalaman kerja dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.58176/akasyah.v3i2.1470>